

Gerakan Aisyiyah Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaannya

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Dian Fitriana

NIM mahasiswa : 16312068

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam artikel ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Juli 2020



Dian Fitriana

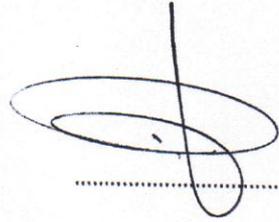
NIM. 16312068

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel oleh : DIAN FITRIANA
NIM : 16312068
Judul : Gerakan Aisyiyah Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaannya. Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji, di Ponorogo, Pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020

Tim Penguji,

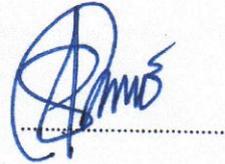
Dr. Sulton, M.Si
NIK. 19650814 200501 1 001



Prihna Sinta Utami, M.Pd
NIK. 19910401 201609 13



Sutrisno, M.Pd
NIP. 199012172 201616 13

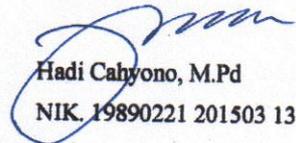


Mengetahui,
Dekan FKIP

Kaprodi,



Dr. Djumadi, M.Pd
NIK. 1962005 199109 12



Hadi Cahyono, M.Pd
NIK. 19890221 201503 13

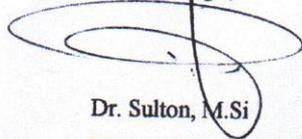
LEMBAR PERSETUJUAN

Artikel oleh DIAN FITRIANA yang berjudul “Gerakan Aisyiyah Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaannya” ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian artikel.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Ponorogo, 31 Juli 2020

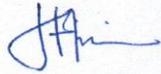
Pembimbing I,



Dr. Sulton, M.Si

NIK. 19650814 200501 1 001

Pembimbing II,



Prihna Sinta Utami, M.Pd

NIK. 19910401 201609 13

HALAMAN PERSEMBAHAN

Artikel ini dipersembahkan kepada rekan-rekan yang selalu memberikan pembelajaran, semangat serta dukungan untuk menyusun skripsi ini dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat selama empat tahun untuk menempuh gelar sarjana. Artikel dipersembahkan kepada:

1. Bapak Dr. Heppy Susanto, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Drs. Jumadi, M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Hadi Cahyono, M.Pd, selaku Ketua Program Studi PPKn.
4. Bapak Dr. Sulton, M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Prihma Sinta Utami, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh bapak ibu dosen Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
7. Keluarga besar saya bapak, ibu, dan kakak semua yang saya banggakan.
8. Terima kasih kepada Nopnop,mbak umi, nduk wila, ita, ani, pipin yang sudah membantu dan memberikan semangat.
9. Serta semua teman-teman Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini.

Akhirnya, semoga penyusunan artikel ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena telah melimpahkan semua keberkahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan judul "Gerakan Aisyiyah Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaannya" yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai tauladan ummatnya.

Keberhasilan penulisan artikel ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Heppy Susanto, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Drs. Jumadi, M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Hadi Cahyono, M.Pd, selaku Ketua Program Studi PPKn.
4. Bapak Dr. Sulton, M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Prihma Sinta Utami, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini.

Akhirnya, semoga penyusunan artikel ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 30 Juli 2020


Dian Fitriana



"Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan Pkn dan Sosial Budaya"
ISSN 2579-9924 (Online)
ISSN 2579-9878 (Cetak)

ACCEPTANCE LETTER

Dear **Dian Fitriana, Sulton, Prihma Sinta Utami**

Your Paper with title:

"GERAKAN AISYIYAH DALAM MENEGUHKAN IDENTITAS
KEWARGAANNYA"

Which, After Having Been Subject to Evaluation by The Arbitral Committee, Was Accepted For Publication In The Civic-Culture Journal Volume 4 No.2 (Extra) August Corresponding to 2020.

Thank you for your interest in our journal. Your Journal paper would be indexed in SINTA-4, DOAJ, DOI, Garuda, PKP Index, One Search, Google Scholar and so on.

We look forward to receiving your subsequent research papers.

Dian
Eka
Indriani

Editor in Chief
Dian Eka Indriani, S.Pd., M.Pd., M.Pd.IK
Nidhiyanti, S.Pd., M.Pd., M.Pd.IK

Dian Eka Indriani

Editor-in-Chief
Civic-Culture Journal (CCJ)
SSN 2579-9878 (print)/ISSN 2579-9924 (online)
<http://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/CC>



LOA | Civic Culture



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONOROGO

Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo
<http://www.umpo.ac.id>

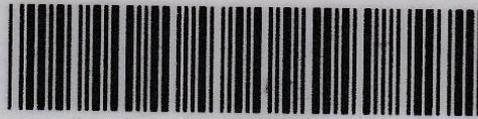


Kartu Anggota Perpustakaan

16312068

DIAN FITRIANA

Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan / Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan



16312057

Kartu ini harus dibawa pada waktu menggunakan fasilitas UPT
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 17-10-2016

Kepala UPT Perpustakaan

Ayu Widiansari, A.Md, S.Kom

19760811 200111 21

SURAT KEPUTUSAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Berdasarkan hasil penilaian dari tim editor dan mitra bestari, artikel dengan perincian sebagai berikut :

Judul : Gerakan Aisiyah Dalam Meneguhkan
Identitas Kewargaannya

Tim Penulis : Dian F. Sultan, Prihna Sinta U.
Prodi/Fakultas : PPKn /FKIP

Dapat dipublikasikan di :

- Jurnal Edupedia, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Edisi Terbitan :
- Jurnal Ilmiah Eksternal/Luar Kampus Unmuh Ponorogo
Nama Jurnal : Civic - Culture
Link Jurnal : http://Publikasi.stkipgri-bki.ac.id
Edisi Terbitan : Volume 9 No. 2 September 2020 (Extra)
- Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo
(eprints.umpo.ac.id)

Demikian informasi yang dapat disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Ponorogo, 16 Oktober 2020
Editor in Chief Edupedia

Wahyudi, S.Si., M.Pd.
NIK. 19910530 201801 13

PM-UPTP-05/F2

FORMULIR PERNYATAAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dian Fitriana

NIM : 16312068

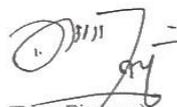
Fakultas/Jurusan : FKIP/PPKn

Judul : **Gerakan Aisyiyah Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaannya**

Menyerahkan sepenuhnya kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada Repository UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 Oktober 2020


(Dian Fitriana)

ALAMAT PUBLIKASI

<http://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/CC/article/view/429>





GERAKAN AISYIYAH DALAM MENEGUHKAN IDENTITAS KEWARGAANNYA

Dian Fitriana

diyanfitriana94@gmail.com

Sulton

sulton@umpo.ac.id

Prihma Sinta Utami

prihmasinta@gmail.com

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ABSTRACT

This study discusses the women's movement which is gathered in the Aisyiyah organization in affirming its citizenship identity. Citizenship politics is a set of civic rights championed by social groups who experience political, economic and cultural exclusion and are always political. In realizing the rights of citizenship, it can be done through three efforts, which are fighting for cultural recognition, social justice and prosperity, fighting for democracy and political representation in synergy. The relatively successful practice of formal democracy in Indonesia is far from enough to guarantee more substantive citizenship. Moreover, the ongoing democratic process shows signs of stagnation, so it is not surprising that the existing democracy only gives its main benefits to the elite oligarchy, while encouraging the struggle of individuals and non-oligarchic groups in using existing rules and regulations to demand rights its citizenship. There are many organizations or movements in Indonesia that struggle for their collective identity. One organization that brings together movements in the public sphere is contestants from women's groups. Basically, women's groups have space to be actively involved in advancing the Indonesian nation. However, the facts on the ground show that women's groups are often marginalized by the environment and even by their own people. Indeed the existence of women has been recognized, but the situation of contemporary Indonesia is still limited in maintaining women's welfare and political representation is neglected for women. This study uses a descriptive analysis approach that seeks to uncover phenomena systematically from a variety of literature. This study focuses on discussing the movements carried out by Aisyiyah in fighting for women. This study aims to discuss the steps Aisyiyah Movement in affirming its citizenship identity and explain the factors that influence the movement of Aisyiyah in affirming its citizenship identity.

Keywords: *Aisyiyah, Movement, Citizenship Identity*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang gerakan kaum wanita yang terhimpun pada organisasi Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya. Politik kewargaan adalah serangkaian hak-hak kewargaan yang diperjuangkan oleh kelompok sosial yang mengalami eksklusi politik, ekonomi dan kultural dan selalu bersifat politis. Dalam mewujudkan hak-hak kewargaan dapat dilakukan dengan melalui tiga upaya, antara lain yaitu memperjuangkan pengakuan kultural, keadilan sosial dan kesejahteraan, memperjuangkan demokrasi dan representasi politik secara bersinergi. Praktik demokrasi formal di Indonesia yang relatif berhasil ternyata jauh dari



cukup untuk menjamin kewargaan yang lebih substantif. Terlebih proses demokrasi yang sedang berjalan menunjukkan tanda-tanda kemandekan, sehingga tidak heran jika demokrasi yang ada hanya memberi keuntungan utamanya bagi kelompok elit oligarki, sembari mendorong perjuangan individu dan kelompok non-oligarki dalam menggunakan tata aturan dan regulasi yang ada untuk menuntut hak-hak kewargaannya. Ada banyak organisasi atau gerakan di Indonesia yang berjuang untuk identitas kolektif mereka. Salah satu organisasi yang menghimpun gerakan-gerakan dalam ranah publik secara kontestan adalah dari kelompok perempuan. Kelompok perempuan pada dasarnya memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam memajukan bangsa Indonesia. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan kelompok perempuan sering kali termarginalkan oleh lingkungan bahkan oleh bangsanya sendiri. Memang eksistensi perempuan telah diakui, tetapi keadaan Indonesia kontemporer masih terbatas dalam mempertahankan kesejahteraan perempuan dan representasi politik terabaikan bagi kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang berusaha mengungkap fenomena secara sistematis dari berbagai kepustakaan. Penelitian ini fokus membahas bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Aisyiyah dalam memperjuangkan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah Pergerakan Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya.

Kata Kunci: *Aisyiyah, Gerakan, Identitas Kewargaan*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi dengan perubahan mendasar terutama dalam hal peran dominan rakyat. Hal ini dapat difahami karena praktik pemerintahan demokrasi menjadi tolak ukur legitimasi hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memprioritaskan rakyat. Oleh karena itu rakyat ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi. (Fauzan, 2015: 85)

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan harusnya diatur sedemikian sehingga seluruh rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan untuk menyelenggarakan sistem demokrasi langsung karena luasnya wilayah dan banyaknya zona penduduk menyebabkan sistem demokrasi tidak langsung tidak memungkinkan untuk diterapkan. Karena itu pilihan untuk menyelenggarakan sistem demokrasi tidak langsung menjadikan keniscayaan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam sistem pemerintahan negara. (Sulton, 2015:3)

Pada tahun 2020 Usman Hamid memprediksi *problem* demokrasi Indonesia, dimana Indonesia menghadapi tiga tantangan yaitu lemahnya penegakan HAM (Hak Asasi Manusia), kuatnya oligarki dalam sistem politik dan kekuatan ideologis dalam berfikir para pemimpinnya. Beberapa contoh yang menguatkan prediksi Usman Hamid antara lain ialah kasus pembubaran organisasi masyarakat, HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) tanpa ada bukti yang jelas, berikutnya soal gelapnya penuntasan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. (Tempo.com, 2020)

Terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan demokrasi, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara adalah praktik sistem demokrasi substansif. Menurut kajian dari Jurgan Haberman, demokrasi substantif adalah demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana demokrasi dan menekankan pada aspek



partisipatory yang mengandalkan keikutsertaan rakyat dalam proses perwakilan secara langsung dalam suatu ruang. (Asmaroini, dkk 2017: 9)

Adanya demokrasi substansi, dapat memberikan ruang kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari kaum perempuan, rakyat jelata, kaum pemuda, golongan minoritas keagamaan dan dari kelompok manapun. Maksudnya agar dapat bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingannya dalam agenda demokrasi di suatu negara. Praktik politik demokrasi dengan demikian bukan menjadi ajang pejuang kepentingan elit melainkan agenda perjuangan kerakyataan (kewargaan). Berbagai kajian menunjukkan pentingnya isu kewargaan dalam demokratisasi di Indonesia (Savirani dan Tornquist, 2015; Tornquist, 2013; serta Stokke dan Tornquist, 2013).

Praktik demokrasi formal di Indonesia yang relatif berhasil ternyata jauh dari cukup untuk menjamin kewargaan yang lebih substantif. Terlebih proses demokrasi yang sedang berjalan menunjukkan tanda-tanda kemandekan, sehingga tidak heran jika demokrasi yang ada hanya memberi keuntungan utamanya bagi kelompok oligarki, sembari mendorong perjuangan individu dan kelompok non-oligarki menggunakan tata aturan dan regulasi yang ada untuk menuntut hak-hak kewargaannya. Meskipun pembangunan kelembagaan demokrasi itu penting, tetapi ia hanya akan berguna jika disertai dengan transformasi dalam perimbangan kekuasaan aktual antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Memperhatikan perkembangan praktik demokrasi di Indonesia membutuhkan perhatian serius karena sudah memasuki level kritis. Praktik demokrasi hari ini sedang menggiring masyarakat terfokus pada isu-isu publik yang dikendalikan oleh para elit maupun kelompok yang berkuasa dan hanya menguntungkan kelompok sosial tertentu. Demokratisasi dan kebebasan warga harus digulirkan, hal ini untuk mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas. Jika tidak ada upaya yang serius untuk mengubah praktik demokrasi yang ada sesuai dengan konsep demokrasi substansif, maka Indonesia kembali mengarah pada sistem otoriter. Dalam keadaan seperti ini kedaulatan rakyat diabaikan, aspirasi rakyat tidak digubris dalam kebebasan pers dan para elit moderat menguasai popularitas, kekuasaan dan kekayaan, oleh karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari segenap komponen warga mengenai pemahaman konsep demokrasi yang lebih berkualitas atau substansif melalui upaya-upaya berkelanjutan dan sistematis.

Upaya demokrasi yang berkelanjutan dalam hubungan antara negara dan warganya harus seimbang. Masyarakat bukan sekedar diakui keberadaannya melainkan dituntut untuk terlibat aktif. Konsep demokrasi yang diikat sangat sederhana, faktanya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan berpendapat dan melaksanakan pengawasan terhadap kekuasaan rezim. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pengendalian dari warga dengan cara memahami dan menguatkan *politik kewargaan*.

Politik kewargaan adalah serangkaian hak-hak kewargaan yang diperjuangkan untuk kelompok sosial yang mengalami eksklusi politik, ekonomi dan kultural dan selalu bersifat politis. Dalam mewujudkan hak-hak kewargaan dapat dilakukan dengan melalui tiga upaya, antara lain yaitu memperjuangkan pengakuan kultural, keadilan sosial dan kesejahteraan, memperjuangkan demokrasi dan representasi politik secara bersinergi. (Hiariej, 2015:1)

Ada banyak organisasi atau gerakan di Indonesia yang berjuang untuk identitas kolektif mereka. Salah satu organisasi yang menghimpun gerakan-gerakan dalam ranah publik secara konsisten adalah kelompok perempuan. Kelompok perempuan pada



dasarnya memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam memajukan bangsa Indonesia. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan kelompok perempuan sering kali termarginalkan oleh lingkungan bahkan oleh bangsanya sendiri. Memang eksistensi perempuan telah diakui, tetapi keadaan Indonesia kontemporer masih terbatas dalam mempertahankan kesejahteraan perempuan dan representasi politik terabaikan bagi kaum perempuan. Fenomena ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih menempatkan kaum perempuan dalam posisi *the second class* dan *second sex*. Dimana kaum laki-laki selalu menjadi *number one* yang dikenal lebih berkekuatan besar, kokoh, agresif dan dominan.

Berbagai bentuk praktek diskriminasi berupa tindak kekerasan, pelecehan seksual dan pemberian upah yang rendah masih terus dialami oleh kaum perempuan. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, di Indonesia diketahui pada tahun 2019 terjadi 406.178 kasus. (Komnasperempuan.go.id, 2020). Salah satu kasus diskriminasi dialami oleh calon kepala dukuh yang seorang perempuan, beliau diremehkan oleh masyarakat banyak. Dalam hal ini, sesungguhnya masyarakat belum paham akan kesetaraan gender, sehingga terjadilah praktik diskriminasi terhadap perempuan yang ingin mencalonkan sebagai kepala dukuh tersebut. (Tirto.id, 2020). Kasus lainnya ialah ada pada pelibatan kaum perempuan diberbagai jabatan publik yang masih sangat terbatas.

Dalam konteks ini berbagai gerakan kaum perempuan dengan tegas menolak stigma sebagai kaum lemah atau *the second class* yang melekat pada perempuan. Perempuan pada dasarnya dapat berkecimpung di arena publik, perempuan berhak memberikan peran terbaiknya untuk negeri yang demokratis. Kaum perempuan secara formal berkedudukan sama dan setara dengan laki-laki. Kaum perempuan berkesempatan dan berpeluang jika mereka ingin bekerja (perempuan karir), misalnya menjadi seorang pejabat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan RI dengan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya serta Tri Rismaharini, yakni sosok Walikota Surabaya yang menegaskan kepada para aktor dan elit politik bahwa kepemimpinan perempuan memiliki eksistensi, kualitas dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki.

Sejalan dengan itu, Aisyiyah sebagai Organisasi Wanita Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912 ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan martabat kaum perempuan Indonesia. Awal mula berdirinya Aisyiyah, dipelopori oleh Nyai Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan salah satu tokoh perempuan hebat yang memiliki pemikiran cerdas di lingkungannya, mulai dari lingkungan keluarga, tokoh-tokoh sampai teman-temannya di organisasi Muhammadiyah. Pemahaman tentang kesetaraan perempuan telah membentuk prinsip hidup yang kuat. Hal ini juga mendorong beliau untuk membentuk lembaga pendidikan formal lalu mengadakan suatu pengajian yang anggotanya hanya perempuan dan kaum muda perempuan saja. Hingga pada akhirnya, organisasi Aisyiyah dapat berkembang pesat dan diterima masyarakat.

Pergerakan yang dilakukan oleh Aisyiyah dimunculkan melalui program-programnya yang mengajak para perempuan baik yang berpendidikan maupun yang awam untuk belajar memberontak dengan cara feminim tanpa harus menjadi wanita yang kasar dan brutal. Lewat program-program masif yang dilakukan oleh Aisyiyah tersebut, Aisyiyah dapat berkembang pesat. Bukan saja menguat posisinya secara signifikan, pergerakan

tersebut juga menguatkan posisi kaumnya dan juga dapat membantu serta meringankan beban pemerintah daerah khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji pergerakan kaum Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya sejak era reformasi, keberadaan Aisyiyah dalam memperjuangkan politik kewargaannya, melalui 3 bidang karakteristik pergerakan yakni pengakuan kultural, redistribusi kesejahteraan dan representasi politiknya serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur atau *library research*, yakni penelitian yang saling berkaitan secara sistematis dari berbagai konsep tentang pergerakan Aisyiyah yang bersumber dari literatur jurnal, majalah, koran, buku, artikel ilmiah, internet dan penelitian yang relevan.

No	Nama Pustaka	Penulis	Alasan Dipilih Sebagai Sumber Data Sekunder
1.	Feminisme Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya (Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Di Ruang Politik)	Afrizky Fajar Purnawan Dan Mohammad Ikhwanuddin	Sumber data sekunder pertama yang penulis pakai dalam penelitian ini memiliki kesamaan pada pokok bahasannya yakni Aisyiyah. Dalam penelitian ini Aisyiyah sangat jelas mendorong kader-kadernya agar terlibat dalam ruang politik, hal itu dibuktikan dengan didorongnya empat kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pileg pada tahun 2019. Selain itu dalam Islam tidak ada larangan untuk perempuan berpolitik bahkan Aisyah istri Nabi Muhammad pernah mencontohkan menjadi pemimpin saat berperang. Penulis juga sepakat dengan PDA Kota Surabaya tentang perlunya keterlibatan perempuan di ruang politik, adalah sebagai bentuk dari kontribusi perempuan dalam menentukan dan membuat sebuah kebijakan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Dari penjelasan diatas, Aisyiyah merupakan wadah platform representasi politik bagi kaum perempuan.
2.	Tantangan Organisasi Perempuan di Kota Padang	Rahayuningtyas & Edriana Noerdin	Penelitian kedua yang penulis pakai sebagai sumber data pustaka adalah penelitian yang membahas tentang organisasi perempuan (ornop). Ornop perempuan yang berkembang di Sumatera Barat setelah 1998 memilih fokus kerja yang beragam, mulai dari

		<p>advokasi kebijakan, pengorganisasian unit ekonomi perempuan, layanan bantuan hukum sampai kepada layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Pertumbuhan organisasi perempuan ini membutuhkan dukungan sumberdaya manusia, dana dan pengetahuan yang tampaknya belum tersedia di Sumatera Barat. Dengan demikian, masing-masing organisasi berusaha untuk membuka hubungan dengan organisasi perempuan atau organisasi non-perempuan yang telah berpengalaman bekerja dalam bidang yang ditekuni organisasi. Akibatnya, prioritas pembangunan jaringan lebih diarahkan kepada organisasi perempuan di luar wilayah, dan bukan dengan organisasi perempuan di Sumatera Barat sendiri. Dalam usaha mengubah tatanan hubungan gender setempat, ornop perempuan memilih untuk bekerja melalui institusi politik non-tradisional, seperti kelompok usaha perempuan, kelompok diskusi warga maupun parlemen lokal. Pilihan ini menunjukkan harapan bahwa peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat bisa dibenahi, dengan lebih banyak melibatkan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan yang didominasi laki-laki. Sumber data pustaka kedua ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni dalam memperjuangkan pengakuan kesetaraan peran perempuan yang terhimpun dalam sebuah organisasi.</p>
--	--	--

Hal ini berguna untuk mengkontruksi tentang gerakan Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya. Cara menganalisis penelitian ini adalah dengan cara deskriptif serta teknik deduktif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun dari masa lampau dan masa sekarang, didukung fakta-fakta maupun fenomena yang terjadi. (Sugiyono, 2010)

III. Hasil dan Pembahasan

Identitas kewargaan bagi setiap kelompok minoritas memiliki makna yang penting, termasuk identitas kewargaan kaum perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Meski



demikian, setiap kelompok minoritas tersebut tidak secara otomatis mendapatkan identitas kewargaannya. Dibutuhkan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak yang setara dengan kelompok-kelompok lainnya. Bagaimana bentuk perjuangan kaum perempuan dalam mendapatkan identitas kewargaannya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perjuangan mereka tersebut merupakan permasalahan pokok yang akan diulas pada sub bab di bawah ini.

A. Profil Singkat Berdirinya Gerakan Aisyiyah

Aisyiyah adalah salah satu organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah, dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang berbasas Islam serta bersumber dari Al-Qur’an dan As- shunnah. (Dyah, 2013:126) Nyai Walidah yang merupakan istri dari Kyai Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh perempuan yang muncul untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Beliau lahir pada tahun 1872 M di kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau memiliki pemikiran luas yang bersumber dari ketekunan beliau belajar mengenai perempuan dalam perspektif islam bersama keluarga dan suaminya. Pada waktu itu, kaum perempuan tidak boleh mengikuti pendidikan formal dan kaum perempuan hanya dianggap sebagai masyarakat *second class* sehingga hak-hak perempuan diabaikan. Tahun 1914 Nyai Walidah dan Ahmad Dahlan membuat kelompok pengajian perempuan ibu-ibu dan anak muda perempuan. Nyai Walidah dan Ahmad Dahlan menjadi guru dan menjelaskan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Kelompok tersebut dinamakan “Sapa Tresna” atau perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman, Yogyakarta.

Pada Tahun 1917 Sapa Tresna berkembang menjadi suatu organisasi besar islam sehingga berganti nama menjadi “Aisyiyah”. Aisyiyah memiliki visi ideal dan visi pengembangan. Visi idealisnya ialah tegaknya agama islam dan terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan visi pengembangannya yaitu tercapainya usaha-usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma’ruf nahi munkar secara berkualitas menuju masyarakat madani. Adapun misi Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan meliputi berbagai bentuk kegiatan.

Gerakan Pemberantasan kebodohan yang menjadi perjuangan Aisyiyah, dicanangkan dengan mengadakan kegiatan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf arab maupun latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini gadis-gadis dan ibu-ibu belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Tahun 1928 gerakan Aisyiyah juga memperkasai organisasi wanita. Dalam hal ini Aisyiyah bersama organisasi perempuan lain bangkit berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang saat ini menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Badan federasi ini bertujuan untuk melakukan berbagai usaha dan perjuangan secara terpadu. Berdirinya organisasi perjuangan kaum perempuan Aisyiyah memiliki muara pada pemberantasan kebodohan, kesetaraan, pengakuan kultural, kesejahteraan dan keadilan sosial serta perjuangan atas representasi politik.



B. Perjuangan Gerakan Aisyiyah Atas Identitas Kewargaan Kaum Perempuan

Perjuangan gerakan Aisyiyah atas identitas kewargaan kaum perempuan dalam mendapatkan identitas kewargaannya dalam hal ini akan dijelaskan menggunakan kerangka analisis politik kewargaan, melalui tiga sudut pandangnya yaitu: perjuangan atas pengakuan kultural, perjuangan atas kesejahteraan dan keadilan sosial dan perjuangan atas representasi politik. (Hiariej dkk, 2016:1) *Pertama*, perjuangan atas pengakuan kultural. Dalam hal ini perjuangan Aisyiyah atas pengakuan keberadaan kaum perempuan difokuskan pada upaya menghadapi berbagai bentuk dominasi budaya, tidak adanya pengakuan, dan tidak adanya penghormatan atas keberadaan kaum perempuan.

Pada era reformasi perjuangan pengakuan identitas sudah marak digemborkan dan memperoleh banyak perhatian mengenai isu berbasis gerakan tersebut. (Hiariej, 2016:21) Gerakan berbasis gender atau seksualitas sedang mempersoalkan dominasi pemaknaan dalam konteks bagaimana "menjadi Indonesia", bukan lagi mempertanyakan tentang ke-Indonesiaan.

Kaum perempuan sampai detik ini juga masih sering kali didominasi laki-laki. Kita semua menjadi saksi atas gejala yang terjadi pada perempuan Indonesia yang masih dipengaruhi oleh alienasi sosial budaya dan agama. Dimana perempuan hanya sebagai subordinat dari kaum laki-laki, dalam aktivitas sosial apalagi aktivitas formal kenegaraan yang membutuhkan kemampuan dan penetrasi tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi perempuan untuk membangun citra representatif perempuan Indonesia yang positif. Sebagaimana dipelopori oleh Aisyiyah sejak tahun 1917. Peran Ke-Indonesiaan kaum perempuan telah dipelopori Aisyiyah jauh sebelum kemerdekaan ditandai dengan keterlibatan Aisyiyah sebagai bagian dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 Desember 1928 serta menjadi anggota Komite Kongres Perempuan Indonesia. (Djohantini, 2018)

Jalan panjang memperjuangkan pengakuan kesetaraan peran perempuan yang dilalui Aisyiyah membuahkan hasil. Setelah satu abad berdiri, eksistensi Aisyiyah sebagai sebuah organisasi diakui dan diapresiasi dibuktikan dengan pengembangan organisasi, dimana saat ini memiliki 33 Pimpinan Wilayah (Setingkat Provinsi), 370 Pimpinan Daerah tingkat kabupaten, 2332 Pimpinan Cabang tingkat kecamatan dan 6924 Pimpinan Ranting tingkat kelurahan. (Qodriah, 2016:154) Selanjutnya, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menjelaskan bahwa saat ini kedudukan Aisyiyah dengan Muhammadiyah sejajar dan setara (dengan pengertian saling koordinasi) serta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pergerakan. (PWMU.co, 2020)

Atas kerja nyata dan prestasinya dalam memperjuangkan kaum perempuan, organisasi Aisyiyah mendapatkan penghargaan Bhakti Khusus dalam penganugerahan Ormas Award 2019 dihotel Kartika Candra, Jakarta Selatan tanggal 25 November 2019 yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Selain itu Aisyiyah juga berperan aktif dan dipercaya dalam pemberantasan TB. Berdasarkan data WHO di Indonesia terdapat 1.020.000 kasus Tuberkulosis (TBC). Adanya kesenjangan atas data laporan tersebut membuat Indonesia harus segera melakukan penanganan. Alternatif Program penanggulangan TB yaitu menjangkiti suspek paru dan melibatkan aktif organisasi masyarakat Wahyudi (Abshor 2020:2).



Aisyiyah ikut serta aktif dalam pemberantasan TB dengan memiliki komunitas bersama pemerintah yaitu Community TB-HIV Care Aisyiyah dan termasuk pengelola dana dari *Principal Recipient*. (Abshor 2020:2) Pada tahun 2017, Aisyiyah mendapatkan rekor MURI dalam penanggulangan TBC pada puncak peringatan Hari TB sedunia dalam program Ketuk Pintu Cari Penderita TB. (TBRAisyiyah.co.id, 2020) Tahun 2020 ini dunia menghadapi tantangan yang meresahkan masyarakat luas. Adanya bencana persebaran virus Covid-19, ketika pemimpin perempuan diberikan peluang harus mampu menunjukkan eksistensinya atas kelebihan-kelebihan dalam diri perempuan yang selama ini tidak dimiliki laki-laki. Perempuan tidak sekedar dihormati dan diakui tetapi perempuan Indonesia harus menempati posisi yang strategis demi tercapainya perubahan-perubahan yang positif. Perjuangan inilah yang menjadikan Aisyiyah mendapatkan tempat dan memiliki pengakuan kultural dalam masyarakat.

Kedua, perjuangan atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada aspek ini perjuangan Aisyiyah atas nasib kaum perempuan ditujukan pada upaya menghadapi eksploitasi, marginalisasi, dan deprivasi sosial ekonomi yang dihadapi kaum perempuan ditengah dinamika dan perkembangan masyarakat. Marginalisasi bagi kaum perempuan bukanlah hal baru lagi, sebab hal itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu kaum perempuan menghadapi kesenjangan, yakni adanya sekat identitas yang dipolitisasi dengan memanfaatkan perempuan.

Di Indonesia banyak dijumpai kasus pendiskreditan terhadap perempuan yang belum kunjung mendapatkan solusi, seperti diskriminasi, *trafficking* Tenaga Kerja Wanita (TKW), pemerkosaan, penindasan dan lain sebagainya. Permasalahan utama terjadinya ketimpangan keterlibatan perempuan dalam sistem tenaga kerja adalah dikarenakan oleh kokohnya budaya patriarki yang mengakar di Indonesia. Salah satu contoh kasus penindasan terhadap perempuan adalah persoalan perempuan di NTT. Dari data *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC) pada tahun 2015 terdapat 1.667 TKW menjadi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Penyebab banyaknya TKW yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan peran yang diterima oleh perempuan NTT sekaligus ketersediaan lapangan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. (Indoprogress.com, 2015)

Misalnya saja penerbitan peraturan daerah guna menjaga moralitas daerah, maka perempuanlah yang dijadikan parameter. Perempuan dibatasi jam malamnya, diatur cara berpakaianya dan menjadi pihak yang terdiskriminasi meskipun yang melakukan tindakan a-moral adalah laki-laki dan perempuan. Dalam tulisannya, Misiyah Misi menegaskan sejak era reformasi sebenarnya sudah ada kemajuan akibat peristiwa yang dialami kaum perempuan dengan terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lain sebagainya. (BBC.com, 2018)

Dalam kaitannya dengan perjuangan atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat, disamping peran aktifnya dalam pemberantasan penyakit menular TBC, Aisyiyah juga konsisten memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat kelas bawah secara berkelanjutan.. Sampai saat ini telah berdiri ratusan lembaga layanan kesehatan dan



ribuan lembaga pendidikan yang didedikasikan oleh Aisyiyah kepada masyarakat, diantaranya: rumah sakit umum Aisyiyah sejumlah 15 buah, rumah bersalin 64 buah, rumah sakit ibu dan anak 7 buah, balai pengobatan 27 buah, balai kesehatan ibu dan anak 44 buah, posyandu lansia 52 buah dan PPKS 17 (bidang kesehatan).

Dalam bidang pendidikan Aisyiyah mengelola 13 sekolah tinggi dan univertistas di seluruh Indonesia, sekolah tinggi dan akademi dibidang kesehatan 8 buah, amal usaha pendidikan PAUD sampai menengah ke atas dengan jumlah 23.772. Selanjutnya dalam bidang kesejahteraan sosial (Panti Asuhan) terdapat 185 buah. Dalam bidang ekonomi 568 buah koperasi, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi melalui BUEKA sebanyak 1.426 buah, serta pengembangan sekolah wirausaha dan pengembangan produk sabun lokal serta susu kedelai. Terakhir, dalam bidang hukum dan HAM, Aisyiyah telah melakukan pendampingan PUSBAKUM di setiap wilayah Indonesia. (Aisyiyah.or.id, 2020). Perjuangan-perjuangan inilah yang mendedikasikan Aisyiyah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui amal usaha, kegiatan aktif serta program-program Aisyiyah yang telah didirikan dan tercapai tujuannya.

Ketiga, perjuangan atas representasi politik. Berbicara tentang representasi politik, tidaklah terlepas dari konsep keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat oleh wakil-wakilnya yang duduk di lembaga eksekutif atau legislatif. Eksistensi keterwakilan politik diukur dari kemampuan para wakil dari masyarakat dari dua lembaga tersebut untuk bertindak atas nama rakyat yang diwakilinya. (Sulton, 2015:41)

Pada aspek ketiga ini, perjuangan Aisyiyah atas nasib kaum perempuan berfokus pada usaha untuk mendapatkan kuota keterwakilan secara politik serta dalam melakukan kontrol atas urusan publik terutama yang berhubungan dengan eksistensi mereka, dan dalam memperjuangkan hubungan demokratis dengan pemerintah. Pada era reformasi, strategi perjuangan kaum perempuan dilakukan secara *affirmative action* yaitu suatu bentuk diskriminasi positif yang pada umumnya dilaksanakan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas yang dalam hal ini ialah kelompok perempuan (Dhewy & Sandiata, 2019:80).

Terkait dengan keterwakilan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 pasal 65 ayat 1 tahun 2003 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa diberikan kuota sebesar 30% untuk mewakili kaum perempuan dengan diharapkan mampu menghasilkan figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas (Al Rafni, 2008:11). Sementara data pada tabel 3.1 dibawah ini menunjukkan bahwa representasi politik perempuan masih jauh dari kuota yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Tahun 1992-2024

Periode	Anggota DPR Perempuan	Presentase (%)	Total Presentase anggota DPR
1992-1997	62	12,5 %	562
1997-1999	54	10,8%	554
1999-2004	46	9%	546
2004-2009	61	11,9%	550
2009-2014	101	18,04%	560
2014-2019	97	17,32%	560
2019-2024	118	20.57%	575

Sumber : www.dpr.go.id, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kuota perempuan belum terpenuhi dari 30% yang sudah diatur dalam undang-undang. Kaum perempuan belum cukup berani dan percaya diri untuk tampil didepan publik dalam partisipasi politik. Hal ini bermula dari budaya patriarki yang masih melekat di bahu bangsa. Pada ketentuannya, posisi dan kesetaraan sudah dihapuskan namun hingga saat ini pandangan laki-laki masih menjawab bahwa kaum perempuan masih berada di kelas dua. Dalam hal ini pun, peran perempuan ada dalam partisipasi politik karena adanya pengaruh laki-laki.

Dalam konteks ini berbagai gerakan kaum perempuan termasuk Aisyiyah dengan tegas menolak stigma sebagai kaum lemah atau *the second class* (Alfrizky, 2018). Perempuan pada dasarnya dapat berkecimpung di arena publik, perempuan berhak memberikan peran terbaiknya untuk negeri dalam berkehidupan yang demokratis. Pemberdayaan politik perempuan tidak disia-siakan oleh pimpinan wilayah Aisyiyah untuk memberikan pendidikan politik kepada Aisyiyah agar dapat terjun dalam partisipasi politik dan ikut andil dalam partai politik di Kalimantan Tengah. Adanya peluang kesempatan 30% perempuan dalam parlemen dan partai politik, membuat Aisyiyah



memanfaatkan strategi perjuangan secara transformatif yaitu suatu bentuk jejaring untuk memperluas dukungan melalui aksi demonstrasi, diskusi, seminar dan sebagainya. (Handayani & Rosmilawati, 2019:41)

Gerakan perempuan juga menggelar lobi dan aksi demonstrasi dalam mendesak agenda keterwakilan kaum perempuan yang melibatkan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (ANSPOL). Program diwujudkan dengan diadakan kegiatan kajian, seminar, workshop, pengajian, pelatihan dan sebagainya. (Dhewy & Sandiata, 2019:81) Pada 13 Juni 2020 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bersama pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan pimpinan cabang Aisyiyah mengadakan silaturahmi melalui *zoom meeting*. Retno Marsudi sangat mengapresiasi keterlibatan aktif Aisyiyah sebagai salah satu wakil dari kaum perempuan yang berkontribusi dalam persoalan-persoalan dunia. Aisyiyah ikut meresmikan *Indonesia Afghanistan Women Network* sebagai bentuk menjalin jejaring kaum perempuan Indonesia Afghanistan atas perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang semakin terjalin. (Aisyiyah.or.id, 2020). Hal ini juga sebagai salah satu visi dan misi yang diwujudkan Aisyiyah dalam representasi politiknya dalam mengemban amanah sebagai organisasi besar islam.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perjuangan Gerakan Aisyiyah

Usaha Aisyiyah dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan dalam mendapatkan identitas kewargaannya tentu tidak berada dalam ruang yang kosong atau netral. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perjuangan kaum perempuan dalam mendapatkan identitas kewargaannya. *Faktor pertama* yaitu faktor sosial budaya. (Adiwilaga, 2017:58)

Budaya patriarkhi dan stigma masyarakat yang menganggap perempuan sebagai kaum lemah dan tidak berdaya dapat kita lihat pada pembagian kerja dalam rumah tangga. Pekerjaan yang ada dalam rumah tangga sangatlah beragam mulai mengatur keuangan memasak, kepiawaiian belanja dengan menyesuaikan selera masing-masing anggota keluarga, menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan rumah, mendidik anak, serta keperluan lain. Semua hal itu menjadi sebuah hal yang mutlak dikuasai oleh perempuan. Sedangkan untuk laki-laki, mereka hanya dituntut untuk bekerja mencari nafkah. Laki-laki yang mana pemimpin keluarga merasa bukanlah kewajibannya melakukan pekerjaan rumah (Rahayuningtyas & Edriana, 2013).

Jika melihat sejarahnya memang peran perempuan sejak dahulu lebih dominan pada pekerjaan domestik sedangkan laki-laki lah yang keluar rumah mencari pundi-pundi uang. Hal ini merupakan hal yang wajar jika memang ada pembagian tugas yang disepakati. Namun dalam prakteknya banyak perempuan yang dituntut bekerja untuk menambah penghasilan suami sembari menanggung beban pekerjaan rumah. Namun bagaimanapun juga, hal ini tidak berarti laki-laki tidak perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan domestik. (ITSNews, 2020)

Gerakan Aisyiyah hadir untuk mengikis dan berusaha memberikan pencerahan serta pencerdasan kepada kaum perempuan. Aisyiyah bergerak dengan cara ikut serta aktif dalam masyarakat melalui pendidikan formal, berdakwah dan perempuan dapat menjalankan peran kemasyarakatan sehingga kaum perempuan tidak direndahkan melainkan dihormati dan diakui keberadaannya. (Qodriah, 2016) Hambatan kultural yang menempatkan laki-laki lebih superior daripada perempuan serta berbagai stigma tentang



ketidakberdayan kaum perempuan menjadi poin yang terus diperjuangkan oleh gerakan Aisyiyah.

Gerakan Aisyiyah harus semakin giat bekerja keras dalam memperjuangkan hak dan derajat yang sama dengan laki-laki, tidak hanya dipandang sebagai pelaku domestik saja, melainkan kaum perempuan ikut andil dalam kegiatan di luar rumah. Ketidakadilan kultur menempatkan pembagian peran perempuan lebih banyak di sektor domestik, seperti yang telah dipaparkan di atas. (Zaini, 2004:166). Berdasarkan pemaparan di atas, pengaruh gerakan Aisyiyah dalam konteks sosial budaya menjadi latar belakang pergerakan Aisyiyah menuju gerakan pencerahan yang harus semakin kuat pada dekade ini melalui amal usaha dan mempersiapkan kader terbaik untuk menghadapi kentalnya kultur budaya yang masih melekat di Indonesia.

Faktor kedua adalah gerakan kesetaraan gender. Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. (Kemenpppa.go.id, 2018)

Kesetaraan gender yang mempunyai makna persamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan hak-haknya agar dapat memiliki peran dan berpartisipasi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sumar, 2015:168). Selain memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai identitas agar sama dengan kaum laki-laki, Aisyiyah juga diberikan hak yang sama seperti halnya kaum laki-laki di Muhammadiyah. Dalam kajian yang pernah dilakukan, dijelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah fisik, bukan mengenai kreatifitas maupun pola pikir untuk kemajuan bangsa. (Qodriah, 2016:168)

Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Fakta-fakta kesenjangan tersebutlah yang memunculkan dukungan-dukungan serta inspirasi untuk berjuang dalam menciptakan kesetaraan gender.

Salah satu contoh adanya dukungan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah melalui gerakannya adalah dengan keluarnya Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2014 Muhammadiyah. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa pandangan dari Al-Quran dan sunnah tidaklah membedakan antara kaum laki-laki dengan



perempuan, semua setara dihadapan Allah SWT, tidak ada subordinasi atau superioritas. (Halimah & Hasibuan, 2018:49)

Hal ini menjadi bukti bahwa Gerakan Aisyiyah turut memiliki suara besar yang diperhitungkan dalam forum Musyawarah Nasional Tarjih tersebut. Melihat penjelasan di atas, kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam upaya pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Maka dari itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu upaya pergerakan dalam mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel bagi seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki.

Faktor ketiga adalah tantangan global, Isu dan arus globalisasi yang terutama terkait dengan perempuan dilevel global telah menginspirasi Aisyiyah dalam pergerakannya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di tanah air. Contoh tantangan global yang akan dihadapi perempuan dalam lingkup global adalah adanya Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri yang sedang berlangsung saat ini telah mengubah kehidupan manusia melalui berbagai teknologi *internet of things*. Digitalisasi teknologi tak dapat dibendung dan begitu cepat memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya pengembangan perangkat atau sistem untuk menjalani tranformasi digital, tetapi juga sumber daya manusia (SDM). (Jawa Pos, 2019)

Kondisi global ini menjadi tantangan yang harus dihadapi perempuan sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Melek digital bagi perempuan harus dijadikan prioritas, karena permintaan terhadap tenaga kerja berliterasi digital di Indonesia terbilang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan rintisan yang banyak bermunculan serta semakin beragamnya layanan teknologi digital yang digunakan oleh perusahaan menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang melek digital. Pemahaman akan perkembangan digital dapat dicapai oleh kaum perempuan jika mereka mendapatkan pendidikan yang cukup dan setara dengan laki-laki. Maka dari itu, tantangan global harus segera disikapi oleh kaum perempuan dengan berupaya memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang dunia digital agar dapat melalui adanya tantangan global ini dengan baik.

Adanya tantangan global, gerakan emansipasi atau kesetaraan gender dan feminisme telah memberikan motivasi kepada Aisyiyah untuk mengedukasi para perempuan. Aisyiyah berpandangan bahwa seharusnya perempuan berdampingan dengan laki-laki dalam berbagai hal fundamental seperti pendidikan dan pekerjaan, bukan hanya sekedar menjadi pengikut saja. Pendidikan merupakan salah satu agen penting yang membawa perubahan. Oleh sebab itu menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak Aisyiyah untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia, yang mendukung Afghanistan, Filipina Selatan dan Mindanao. Retno mengajak Aisyiyah berpartisipasi aktif bersama ECOSOC (*Economic and Social Council*). Gerakan Aisyiyah di dunia global juga telah menggerakkan kaum perempuan untuk tetap aktif berpartisipasi sehingga tidak lagi meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan. (Aisyiyah.co.id, 2020)

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pergerakan Aisyiyah atas identitas kewargaannya. Munculnya berbagai macam bentuk pergerakan oleh Aisyiyah didasari oleh adanya keadaan sosial budaya Indonesia yang masih mendiskreditkan perempuan, belum tercapainya kesetaraan gender



dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya tantangan global Revolusi Industri 4.0. Poin-poin tersebutlah yang menjadi dasar dari munculnya pergerakan Aisyiyah tersebut.

IV. Kesimpulan

Upaya perjuangan Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya dijelaskan dari tiga aspek yaitu: 1). Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kultural, dimana hak-hak perempuan seharusnya diakui keberadaannya dan ditempatkan pada posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Pengembangan organisasi Aisyiyah menyebar ke seluruh nusantara dari tingkat pusat sampai ranting, berikut peran, pengakuan dan deretan prestasinya sampai ke tingkat internasional merupakan bagian dari sukses Aisyiyah dalam mendapatkan pengakuan atas peran perempuan yang setara dengan laki-laki. 2) Perjuangan atas keadilan dan kesejahteraan sosial. Budaya patriarkhi yang melekat masih saja menghantam kaum perempuan di era ini, bahkan ketidakadilan gender masih mewarnai kehidupan kaum perempuan. Berbagai permasalahan perempuan dalam menghadapi eksploitasi, marginalisasi dan deprevisi sosial menjadikan sekat identitas dipolitisasi untuk memanfaatkan perempuan. Dalam hal ini Aisyiyah melakukan pembuktian untuk membela hak-hak perempuan dengan mendirikan suatu badan amal usaha, melaksanakan kegiatan positif, membangun pendidikan dan lain sebagainya kepada seluruh masyarakat terutama pada perempuan dan bangsa Indonesia. 3). Perjuangan atas representasi politiknya. Keterwakilan kaum perempuan melalui organisasi Aisyiyah secara *affirmative action* membantu kaum perempuan dalam memperjuangkan aspirasinya di majelis musyawarah Indonesia. Pemerintah bersama Aisyiyah membangun aliansi untuk mewujudkan identitas perempuan secara berkelanjutan.

Perjuangan pergerakan Aisyiyah diatas tentu tidak terlepas dari beberapa terinisiasi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 1) Faktor keadaan sosial, budaya patriarkhi yang masih melekat, dimana peran perempuan dibatasi dan jarang atau tidak boleh berkecimpung di depan publik serta hampir seluruh kegiatan didominasi laki-laki. Oleh karena itu Aisyiyah hadir untuk mengikis stigma tersebut melalui pembentukan badan amal usaha dan mempersiapkan kader terbaik untuk menghadapi kentalnya kultur budaya yang masih melekat di Indonesia. 2). Faktor kesetaraan gender, faktor ini memberikan pesan bahwa perempuan dan laki-laki tidaklah ada bedanya kecuali bentuk fisiknya, sebagaimana telah diperjuangkan oleh Aisyiyah dalam keputusan tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2014. Hal ini memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu upaya pergerakan dalam mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel bagi seluruh penduduk terutama kaum perempuan. 3) Adanya faktor tantangan global revolusi 4.0. Isu global memberikan dampak terhadap kaum perempuan seperti banyaknya kejahatan *cyber*, *trafficking*, virus menular dan lain sebagainya. Tantangan global menjadi faktor terakhir yang harus dihadapi oleh Aisyiyah dalam meneguhkan identitas kewargaannya. Tantangan global baiknya disikapi dengan inovasi dan kolaborasi yang diprakarsai oleh Aisyiyah. Demikianlah yang menjadikan gerakan Aisyiyah sebagai salah satu pergerakan yang utuh untuk melakukan transformasi demi tercapainya identitas kewargaan akar rumput melalui melek digital dan turut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia.



Daftar Pustaka

Buku:

- Asmaroini, Sulton,dkk. 2017. *Sistem Demokrasi di Indonesia*. Unmuh Ponorogo Press.
- Hiariej, E. (2015). *Post Clientelism in Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press.
- Mann, M. (1987). *Ruling Class Strategies and Citizenship Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mayo, B. Henry. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Nurtjahjo, Hendra. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Madiun: Bumi Aksara.
- Soche, H. Harris. (1985). *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita.
- Stokke, K. dan Tornquist O. (2013). *Democratization in the Global South: The Important of Transformative Politics*. Basingstoke dan New York: Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulton. (2015). *Ordebaru dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Sulton. (2015). *Pemilu dan Kepemimpinan Nasional*. Ponorogo: Wade Group.
- Turner, B. S. (1992). *Outline of A Theory of Citizenship*. Dalam C. Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso.

Jurnal:

- F., Fauzan, (2015). Pengaruh Religiusitas Dan Ethical Climate Terhadap Ethical Behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(3), hlm 187-202.
- Purnawan, Afrizky Fajar dan Mohammad Ikhwanuddin. (2018). Feminisme Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya (Studi Tentang



Keterlibatan Perempuan di Ruang Politik). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*.
Vol. 7. No. 1, hlm 14-15.

Rahayuningtyas & Edriana Noerdin. (2013). Tantangan Organisasi Perempuan di Kota Padang. *Afirmasi: Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis*. Vol 02. hlm 129-134.

Internet:

Aisyiyah, “Peran dan Perkembangan”, <http://www.aisyiyah.or.id/id/page/peran-dan-perkembangan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Aisyiyah, “Program TB-HIV Care 'Aisyiyah'”, <http://www.aisyiyah.or.id/id/page/kerjasama.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

BBC, “Perda-Perda yang 'Diskriminatif' Menurut Komnas Perempuan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46261681>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

ITS News, “Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia”, <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Jawa Pos, “Tantangan Perempuan di Era Digital dalam Perspektif Kesetaraan Gender”, <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/11/29/168040/tantangan-perempuan-di-era-digital-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

KEMENPPPA, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”, <https://www.kemempppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Komnas Perempuan, “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Syambudi, Irwan, “Duduk Perkara Penolakan Perempuan Jadi Kepala Dukuh di Bantul”, <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-perempuan-jadi-kepala-dukuh-di-bantul-dSV2>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.



Tempo.co, “Peneliti Kaji Tantangan Demokrasi dan HAM Indonesia, <https://creativelab.tempo.co/read/1281503/peneliti-kaji-tantangan-demokrasi-dan-ham-indonesia-2020>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Uzlifah, “Aisyiyah Itu Setara dengan Muhammadiyah tapi Bukan Jalan Sendiri-Sendiri”, <https://pwmu.co/80782/11/25/aisyiyah-itu-setara-dengan-muhammadiyah-tapi-bukan-jalan-sendiri-sendiri/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

